

**Kekuatan pembuktian data elektronik *video compact disc (vcd)*
sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengrusakan
kantor dpc pdip di pengadilan negeri sragen**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh :
Putri Cahya Diatri
E 0003264**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007
PERSETUJUAN**

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Edy Herdyanto, S.H., M.H
NIP. 131 472 194

Soehartono, S.H., M.H
NIP. 131 472 195

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan
Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal: 24 Juli 2007

Dewan Penguji :

(1).....(Bambang Santoso S.H.,M.Hum)
(Ketua)

(2).....(Kristiyadi S.H., M.Hum)
(Sekretaris)

(3).....(Edy Herdyanto S.H., M.H)
(Anggota)

Mengetahui:

Dekan

(Moh. Jamin, S.H., M.Hum)

NIP. 131 570 15

MOTTO

“ Kunci sukses adalah kegigihan memperbaiki diri dan kesungguhan untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini”

(Gym's MQ)

“ Cukuplah Allah yang menjadi sandaran, karena Dia tak akan mengecewakan siapa pun yang bersandar kepada-Nya

PERSEMBAHAN:

- ❖ *Bapak, Ibu dan adik-adiku*
- ❖ *All my Friends*
- ❖ *Almamater*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : **“KEKUATAN PEMBUKTIAN DATA ELEKTRONIK *VIDEO COMPACT DISC* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA Pengerusakan Kantor DPC PDIP DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN”**.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini membahas tentang penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian *VCD (Video Compact Disc)* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen dan kendala yang dihadapi hakim dalam hal memanfaatkan data elektronik berupa *VCD* dalam pembuktian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya isi penulisan hukum ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan surat ijin penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Soehartono, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

4. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.H selaku pembimbing akademis yang memberikan nasehat, bimbingan, dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah mendidik dan mengajar Penulis dari awal hingga akhir masa belajar di Fakultas Hukum UNS.
6. Bapak H. Imam Su'udi, S.H. M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Sragen atas ijin yang diberikan, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Agustinus Setya W, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sragen atas waktu dan ilmu yang diberikan selama Penulis melakukan penelitian.
8. Bapak Dwi Tomo, S.H. M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sragen atas ilmu yang telah diberikan dalam penulisan hukum ini.
9. Muhamad Nur Aberor, SHI., staf bagian hukum di Pengadilan Negeri Sragen atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.
10. Seluruh Staf dan karyawan di Pengadilan Negeri Sragen atas bantuannya yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.
11. Bapak, ibu dan adik-adikku yang penulis sayangi atas doa, dorongan, dan dukungan kepada penulis.
12. Saudara-saudara di BoyL atas doa dan dukungannya.
13. Raden Pandu, thanks for your support, your pray and your patient.
14. Sahabatku Isrudatin, Nana, Ariy, Andri, Dhe-vi, Jatu, Bow2, Endri atas persahabatan doa dan dukungannya.
15. Teman-teman angkatan 03 Bebex, Tya, Riyadini, Dina, Ekha, Remana, Mila, Niken, Bunga, Fauzan, Vivie, Ika, Rini, Shinta, Itok, Rizki, Iman, Unink.
16. Teman seperjuangan Johan thanks for all.

17. Teman-teman kosku di PB 5 M'Nita, Lia, Rufvi, M'Mini, Bety, M'Dila, Eky atas bantuan, dukungan dan kebersamaan kita selama ini.
18. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan Skripsi ini.

Surakarta, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian.....	13
a) Pengertian Pembuktian	13
b) Sistem Pembuktian.....	15
c) Sistem Pembuktian Dalam KUHAP	21
d) Alat Bukti.....	23
2. Tinjauan Umum Tentang Data Elektronik Dalam Pembuktian	33
a) Data Elektronik Berupa <i>Video Compact Disc (VCD)</i>	33
b) Pemanfaatan Data Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan	33
B. Kerangka Pemikiran.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Data Elektronik <i>Video Compact Disc (VCD)</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Kantor DPC PDIP Sragen.....	38
1. Kasus Posisi	39
2. Proses Pembuktian	41
3. Hal-hal yang Mempengaruhi Pengadilan dalam Suatu Pengambilan Keputusan.....	45
Pembahasan.....	47
B. Kendala yang Dihadapi Hakim dalam Memanfaatkan Data Elektronik berupa <i>Video Compact Disc (VCD)</i> dalam pembuktian ...	51

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Ijin Penelitian
- Lampiran II Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran III Putusan Pengadilan Negeri Sragen Perkara Tindak Pidana
 Pengerusakan Kantor DPC PDIP Sragen dengan Terdakwa Toni
 Suwondo.Dkk.

ABSTRAK

PUTRI CAHYA DIATRI, E 0003264, KEKUATAN PEMBUKTIAN DATA ELEKTRONIK *VIDEO COMPACT DISC* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA Pengerusakan Kantor DPC PDIP DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi) 2007

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian *VCD (Video Compact Disc)* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen dan kendala yang dihadapi hakim dalam hal memanfaatkan data elektronik berupa *VCD* dalam pembuktian di Pengadilan Negeri Sragen.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Sragen. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penilaian Hakim terhadap kekuatan pembuktian *video compact disc (vcd)* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen adalah bahwa Dalam hal ini alat bukti *video compact disc (vcd)* sebagai alat bukti yang sah sama dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, *video compact disc (vcd)* merupakan alat bukti petunjuk. Petunjuk disimpulkan hakim dalam kasus ini karena adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pemberian nilai atas petunjuk itu diserahkan kepada kepada kebijaksanaan hakim. Dalam hal ini keyakinan hakim juga erat kaitannya dengan alat bukti, karena diantara keduanya harus saling mendukung untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan. Kendala yang dihadapi hakim dalam memanfaatkan data elektronik berupa *video compact disc (vcd)* dalam pembuktian adalah bahwa data elektronik berupa *video compact disc (vcd)* adalah belum diatur secara lengkap tentang ketentuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peradilan istilah-istilah bukti, alat bukti dan pembuktian menjadi posisi penting dari proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2002:273). Hal ini sangat menentukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis dalam suatu perkara, karena hakim akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian ini. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian yuridis, tentang membuktikan menurut (Sudikno Mertokusumo, 1981:91). “Tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.”

Alat bukti dalam pembuktian adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat memperkuat dakwaan, tuntutan dan gugatan (Bambang Waluyo, 1996:3). Data elektronik berupa *VCD (Video Compact Disc)* dalam penelitian ini merupakan media berupa barang yang dapat menyimpan data atau informasi dalam berbagai bentuk, seperti: teks, gambar, presentasi, slide, audio.

Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa dipergunakan, karena hanya

beberapa perkara tertentu saja di pengadilan yang memakai alat bukti ini. Hal ini menyebabkan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Padahal di beberapa negara data elektronik sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara, baik itu perkara perdata atau pidana.

Penggunaan alat bukti berupa rekaman video atau *VCD* sebenarnya telah diterapkan di dalam kasus Bom Bali I, 2002 lalu. Dalam menggunakan alat bukti ini penyidik merujuk pada pasal 27 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Demikian pula yang diatur dalam RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Tentu saja, informasi elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Terbatasnya jumlah alat bukti yang terdapat di dalam KUHAP yang sekarang bukan berarti membatasi, tetapi untuk memajukan dokumen elektronik sebagai alat bukti di dalam persidangan.

Dalam ketentuan pasal 184 KUHAP yang mengatur bahwa Alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut dapat ditanyakan bahwa dimanakah letak *VCD* sebagai alat bukti? Karena dalam KUHAP saat ini ketentuan penggunaan *VCD* belum diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Ketentuan yang mengatur hal ini sedang dimasukkan dalam draft revisi KUHAP. Dengan adanya penegakan hukum di Indonesia yang sudah mengalami banyak perkembangan maka di Era digital ini seharusnya KUHAP bisa beradaptasi sesuai dengan

perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan dengan adanya alat bukti data elektronik berupa *VCD* maka hakim harus lebih hati-hati dan cermat menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” data elektronik berupa *VCD* sebagai alat bukti yang termasuk dalam Pasal 184 KUHP. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul “**KEKUATAN PEMBUKTIAN DATA ELEKTRONIK VIDEO COMPACT DISC SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA Pengerusakan Kantor DPC PDIP di Pengadilan Negeri Sragen**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian *VCD* (*Video Compact Disc*) sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen?
2. Kendala apa yang dihadapi hakim dalam hal memanfaatkan data elektronik berupa *VCD* dalam pembuktian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok yaitu tujuan subyektif dan tujuan obyektif, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mengetahui bagaimana penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian berupa *VCD* dalam perkara tindak pidana pengerusakan kantor DPC PDIP.
 - b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim dalam hal memanfaatkan data elektronik berupa *VCD* dalam pembuktian.

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya yang menyangkut masalah alat bukti melalui *video compact disc* dalam peradilan pidana.
- b) Untuk memperluas pemahaman serta pengembangan aspek hukum dalam teori maupun praktek di lapangan.
- c) Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terkhusus dalam hukum acara pidana khususnya hukum pembuktian dimana pembuktian ini menggunakan data elektronik berupa *video compact disc*.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan bahan informasi ilmiah, mengingat penggunaan *video compact disc* sebagai alat bukti yang masih baru dalam penerapan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b) Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang sama.

D. Metode Penelitian

Metodelogi Penelitian dalam hal ini terdiri dari dua kata yaitu metodelogi dan penelitian. Istilah “metodelogi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto,1986: 5)

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. (Bambang Waluyo,1991:21)

Dengan demikian metode penelitian merupakan cara-cara atau teknik untuk melakukan prosedur penelitian, dengan tujuan untuk bisa lebih mengetahui dan mendalami ilmu pengetahuan sehingga akan didapatkan suatu kebenaran sehingga jawaban atas pertanyaan dan ketidaktahuan tentang sesuatu hal. Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah senagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer atau data yang di dapatkan di lapangan atau dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1984:10). Maksud penelitian ini terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashofa, 2004: 20-21)

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Pengadilan Negeri Sragen. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Sragen terdapat data yang cukup lengkap untuk pembuatan penulisan ini.

5. Jenis Data

a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan , dimana diperoleh langsung dari sumber pertama ataupun melalui penelitian baik berupa fakta ataupun keterangan. Data yang dimaksud

dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dari Pengadilan Negeri Sragen yaitu hakim yang berperan dalam memutus perkara berdasarkan alat bukti *VCD* yang merupakan alat bukti dalam perkara tersebut, sehingga dapat diketahui kekuatan pembuktian dari alat bukti yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi data sekunder ini merupakan data yang relevan dan mendukung berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini diperoleh dari literature, catatan, buku, dokumen, arsip, karya ilmiah yang mendukung dan peraturan perundang-undangan.

6. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam mengadakan penelitian penelitian ini ada dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, berupa keterangan-keterangan dari pihak yang relevan dari Pengadilan Negeri Sragen. Pihak yang dimaksud yaitu hakim-hakim yang berperan dalam memutus perkara ini.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai bahan penunjang data primer, data-data sekunder tersebut terdapat dalam buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan pendapat para ahli, atau dalam dokumentasi resmi dari pemerintah yang memuat peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, laporan-laporan, surat. Bahan hukum primer terdiri dari KUHP dan KUHAP dan bahan hukum tersier menggunakan data dari media internet, kamus, ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia.

7. Instrumen Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh penulis disini yaitu jenis wawancara terpimpin. Sutrisno Hadi (2001: 207) menjelaskannya sebagai wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan atau kekuatan proses wawancara dapat terkontrol. Wawancara ini akan dilakukan dengan sumber pertama (sumber data primer) yaitu hakim-hakim di Pengadilan Negeri Sragen yang telah memutuskan perkara dengan alat bukti persangkaan berupa *Video Compact Disc (VCD)*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud di sini yaitu pengumpulan data dengan cara yaitu mengumpulkan data-data, buku-buku, dokumen-dokumen dan bahan pustaka lainnya yang relevan atau berkaitan dengan pembahasan penelitian. Penulis disini akan mengumpulkan data-data dengan mempelajari:

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sragen.
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian penulis adalah dengan analisa kualitatif model interaktif. Analisa kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu analisa dengan tiga komponen yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses

yang berbentuk siklus. Ketiga komponen analisis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data.

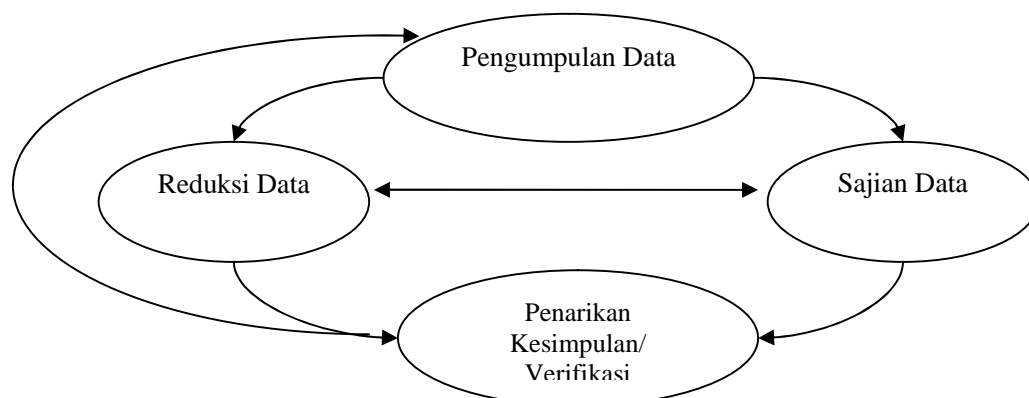
Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

b. Penyajian data.

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan dan konfigurasi yang mungkin, arahan, sebab akibat, dan berbagai proporsi, kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya, teknik analisis data dengan model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :



Komponen-komponen Analisis Model Interaktif

(H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*)

Ketiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi dimulai dengan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan dengan verifikasi sehingga akan dapat memperoleh data yang benar-benar dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan dalam menyusun laporan penelitian, penulis membuat rancangan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. Dalam Kerangka Teori memuat tentang Tinjauan Umum memuat tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian, alat-alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1)

KUHP, beberapa Teori Sistem Pembuktian, Tinjauan Umum memuat tentang Data Elektronik berupa Video Compact Disc (VCD), definisi Data Elektronik berupa VCD, Pemanfaatan Data Elektronik sebagai alat bukti di persidangan

Sedangkan Dalam kerangka pemikiran, penulis akan memaparkan ide atau gagasan mengenai gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas pada penulisan hukum ini dalam bentuk bagan disertai dengan keterangannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai Penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian berupa *VCD (Video Compact Disc)* dalam perkara tindak pidana pengrusakan kantor DPC PDIP Sragen dan kendala yang dihadapi hakim dalam hal memanfaatkan data elektronik berupa VCD dalam pembuktian.

BAB IV : PENUTUP

Bagian akhir berisi beberapa kesimpulan dan saran yang meliputi jawaban dari permasalahan bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian

a) Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan tentang pembuktian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian sehingga pengertian mengenai pembuktian diberikan oleh para ahli.

Menurut M.Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2002:273). Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim harus lebih hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Dari uraian singkat tersebut arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain berarti:

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.
- b. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "*limitatif*", sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim semata-mata.

Bambang Poernomo memberikan pengertian mengenai hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar

dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap segala alat bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana . (Bambang Poernomo, 1993 : 38). Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana. (Bambang Poernomo, 1993:38).

b) Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan terpenuhi pembuktian minimum sudah dapat dianggap membuktikan kesalahan terdakwa? Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, masih diperlukan faktor atau unsur "keyakinan" hakim? pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. (M. Yahya Harahap, 2002 : 276)

Beberapa Teori Sistem Pembuktian (M. Yahya Harahap, 2002 : 277) yaitu:
(1) *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan di simpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperikasinya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah tentu mengandung

kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaiknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa "tidak terbukti" berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas "dasar keyakinan" hakim. Keyakinan hakimlah yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

(2) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas dasar kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus "reasonable, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar yang diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian yang masuk akal.

(3) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, ''keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian'' dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata''digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah''. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah ''robot pelaksana'' undang-undang yang tidak memiliki hati nurani, Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

Bagaimana kalau sistem ini dibandingkan dengan sistem pembuktian keyakinan atau *conviction-in time*? kita berpendapat, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih sesuai dibanding dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat prinsip ''penghukuman berdasar hukum''. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

(4) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara eksterm. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif''mengabungkan'' ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu terwujudlah suatu ''sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif''. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa di tentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan rumusan tersebut, untuk menyatakan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian

menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian tersebut, untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- i. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- ii. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur "obyektif" dan "subyektif" dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantar kedua unsur tersebut. jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim "tidak yakin" akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, di antara kedua komponen tersebut harus "saling mendukung"

Sepintas lalu pembuktian menurut undang-undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Umpamanya, walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat "dianulir" atau "ditiadakan" oleh

keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, atas alasan hakim "tidak yakin" akan kesalahan terdakwa. Terbukti memang cukup terbukti secara sah, namun sekalipun terbukti secara sah, hakim tidak yakin akan kesalahan yang telah terbukti tersebut. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Barangkali disinilah letak kelemahan sistem ini. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tetapi dalam praktek, secara terselubung unsur keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati, atau hakim yang kurang tangguh benteng iman dan moralnya, gampang sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa.

Dimanakah dijumpai di dunia ini suatu sistem yang sempurna tanpa cacat? Bagaimanapun baik atau buruknya suatu sistem, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang berada di belakang sistem yang bersangkutan.

c) Sistem Pembuktian Dalam KUHAP

Setelah menjelaskan sebagai bahan perbandingan, tiba saatnya mengkaji sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHAP. Sistem pembuktian mana di antara salah satu sistem tersebut yang diatur dalam KUHAP?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya".

Kalau dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Bunyi Pasal 294 HIR: "Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti

menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”.

Dari kedua bunyi pasal tersebut, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem ”pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat ”pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah”, lebih ditekankan pada perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat : ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa ”sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya ”dua alat bukti yang sah”.
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim ”memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin ”tegaknya kebenaran sejati” serta ”tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Pendapat ini diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan ”sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positief wettelijk stelsel*).

Memang benar jika direnungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian *conviction-in time*, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa karena penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda; sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi, sebaliknya jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

d) Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menentukan secara "*limitatif*" alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu: 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk dan 5. Keterangan terdakwa. Maka diluar alat bukti itu tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti

di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

(1) Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHP, yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi merupakan kewajiban setiap orang, terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk datang sebagai saksi atau ahli meskipun sudah dipanggil secara sah, diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 224 dan 522 KUHP. Di dalam KUHP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam pasal 168, 170 dan 171 KUHP. Pengecualian yang termasuk di dalam pasal 168 KUHP adalah kelompok orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kelompok ini terdiri dari:

- (a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- (b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga yang mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- (c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam ayat (1) pasal 170 KUHP ditegaskan, “mereka yang karena pekerjaan, rangsan harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan

kepada mereka.” Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, “ bahwa Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

Pengecualian dalam pasal 171 KUHAP mengatur pengecualian keterangan tanpa sumpah yang diberikan oleh anak di bawah umur lima belas tahun dan orang sakit ingatan. Ditentukan dalam pasal tersebut bahwa yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- (a) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- (b) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai “tambahan” alat bukti yang sah maupun untuk “menguatkan keyakinan” hakim atau sebagai “petunjuk” harus dibarengi dengan syarat:

- Harus lebih dulu ada alat bukti yg sah, misalnya telah ada bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.
- Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
- Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.

Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi adalah:

- (a) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali di sertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP).
- (b) keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keadaan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan

adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (pasal 185 ayat (4) KUHAP).

- (c) dalam menilai kebenaran saksi, hakim harus memperhatikan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP) :
- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - cara hidup dan berkesuksesan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (d) keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan alat bukti dari keterangan saksi adalah bersifat bebas dan tidak mengikat artinya hakim bebas menilai dan tidak terikat pada alat bukti tersebut. Alat bukti keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai kekuatan yang sempurna artinya tidak dapat berdiri sendiri, harus didukung dengan alat bukti yang lain sesuai dengan batas minimum alat bukti.

(2) Keterangan ahli (*Verklaringen van eendeskundige : Expert Tertimony*)

Mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, Pasal 1 butir 28 KUHAP) menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. hal yang membedakan dengan keterangan saksi adalah pemberian keterangan ini harus mempunyai keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian

penilaian dan kesimpulan. Keterangan ahli dapat diberikan dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tertulis. Dalam bentuk lisan disampaikan secara langsung di depan sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh Panitera. Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP mensyaratkan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Seorang ahli sebelum memberi keterangan ada keharusan untuk mengucapkan sumpah atau janji (pasal 161 KUHAP). Namun demikian jika pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).

Sedangkan berbentuk tertulis berupa laporan yang sering disebut *visum et repertum* dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli yang berupa laporan dapat juga dikategorikan sebagai alat bukti surat, berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHAP.

Jadi kalau dihubungkan dari beberapa pasal yang memuat tentang keterangan ahli dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a) Keterangan ahli kedokteran kehakiman yang berisi keahlian khusus dalam bidang kedokteran yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik, misalnya : korban pembunuhan atau korban penganiayaan.
- b) Keterangan ahli secara umum yang mempunyai keahlian khusus dibidang tertentu, misalnya : ahli jiwa, ahli sidik jari, ahli kimia dan lain sebagainya.

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (penjelasan 161 ayat (2) KUHAP).

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah

(a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Di dalamnya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk harus menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

(b) Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam Pasal 185 ayat (2) menegaskan bahwa seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa maka harus disertai dengan alat bukti lain.

(3) Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang jika dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat yang dimaksud adalah:

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Kekuatan alat bukti surat adalah bersifat bebas dan tidak mengikat artinya hakim bebas untuk menilai kebenaran isi surat dan hakim bebas untuk menilai kebenaran isi surat dan hakim tidak harus terikat pada alat bukti tersebut. Hakim dalam menilai kekuatannya dan kebenarannya dapat meninjau dari segi kebenaran sejati, atas keyakinannya maupun batas minimum pembuktian.

(4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) merumuskan Petunjuk sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Menurut Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi,
- b) Surat,
- c) Keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk hanya dapat dipakai dalam keadaan tertentu yang diambil oleh hakim setelah mengadakan pemeriksaan dengan cermat

dan seksama sesuai dengan hati nuraninya. Keadaan tertentu dimaksud adalah bersifat :

- a. Alat bukti petunjuk selalu tergantung dan bersumber dari alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- b. Alat bukti petunjuk diperlukan jika hakim beranggapan bahwa alat bukti yang lain belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Alat bukti petunjuk diperlukan jika alat bukti yang lain belum memenuhi batas minimum pembuktian.

Alat bukti petunjuk itu merupakan hasil pengamatan atau konstruksi yang dibuat oleh Hakim selama persidangan. Mengingat alat bukti petunjuk ini sepenuhnya di tangan hakim sudah sewajarnya penilaian atas kekuatan pembuktiannya harus dilakukan oleh hakim dengan arif, bijaksana dan objektif. Berhubungan dengan ini, Pasal 188 ayat (3) menentukan:

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan, berdasarkan hati nuraninya.”

Kekuatan alat bukti petunjuk mempunyai nilai kekuatan yang sama dengan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, yaitu bersifat bebas dan tidak mengikat artinya hakim bebas menilainya dan hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk.

(5) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan, “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.” Sedangkan dalam pasal 189 (1) KUHAP menyatakan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHAP dapat dijadikan dasar untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa. Bunyi pasal tersebut adalah:

- a) Ayat (3): Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- b) Ayat (4): Keterangan terdakwa hanya tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.

Maksud rumusan ayat (3) tersebut adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dapat memberikan keterangan tidak/tanpa mengucapkan sumpah atau janji. Sedangkan dalam ayat (4), di samping keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa serta berdasar Pasal 183 KUHAP maka keterangan terdakwa itu tidak dapat untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti lain yang sah.

Landasan bahwa keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah meliputi :

- a) Bahwa keterangan terdakwa harus dinyatakan dalam persidangan. Keterangan tersebut dapat berisi penjelasan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Petuntut Umum dan Penasehat Hukum, baik yang berisi pengingkaran maupun pengakuan.
- b) Bahwa keterangan terdakwa bersifat penjelasan tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau alami sendiri.

- c) Bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Artinya apa yang diterangkan oleh terdakwa dalam persidangan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini seorang terdakwa selain memberikan keterangan sebagai terdakwa dapat pula memberikan keterangan sebagai saksi, apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh satu orang dan berkasnya diajukan terpisah oleh Penuntut Umum.

Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat artinya hakim bebas untuk menilai terhadap keterangan yang diberikan terdakwa dan hakim tidak terikat akan isi keterangan tersebut.

Dari kelima alat bukti yang sah menurut undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, yaitu bersifat bebas dan tidak terikat artinya hakim bebas untuk menilai dan tidak terikat pada pembuktiannya. Namun dalam hal ini hakim dalam menggunakan kebebasan yang menjadi haknya harus dilandasi tanggung jawab moral dan kejujuran yang tinggi dengan mewujudkan kebenaran sejati, sehingga rasa keadilan akan dapat dicapai.

2. Tinjauan Tentang Data Elektronik Dalam Pembuktian

a) Data Elektronik Berupa *Video Compact Disc*.

Data elektronik adalah segala macam data elektronik yang di antaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan *Video CD* atau *VCD* adalah format untuk menyimpan *video* ke dalam *compact disc*. Video CD dapat diputar dengan menggunakan *VCD Player* atau komputer pribadi. *VCD (Video Compact Disc)* saat ini sudah umum digunakan di seluruh dunia karena merupakan perlengkapan standar yang dapat diandalkan. *VCD* dapat dengan mudah dibawa dan bahkan bisa untuk menyimpan data. Secara umum, pengertian *VCD* adalah media untuk menyimpan data atau informasi lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan *floppy disk*. *VCD* dapat menyimpan informasi dalam berbagai bentuk, seperti: teks, gambar, presentasi, slide, audio dan video.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data elektronik berupa video compact disc merupakan suatu informasi elektronik yang mudah dibawa atau dapat dipindahkan (*portable*) yang dapat menyimpan informasi dalam bentuk teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya.

b) Pemanfaatan Data Elektronik sebagai Alat Bukti di Persidangan.

Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti telah diatur dalam tiga undang-undangan pidana yaitu UU.25 Tahun 2003 perubahan UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 38, didalamnya menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di samping alat bukti berdasarkan KUHAP, UU No. 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 A, yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di samping alat bukti berdasarkan KUHAP. Ketiga undang-undang tersebut telah memberikan

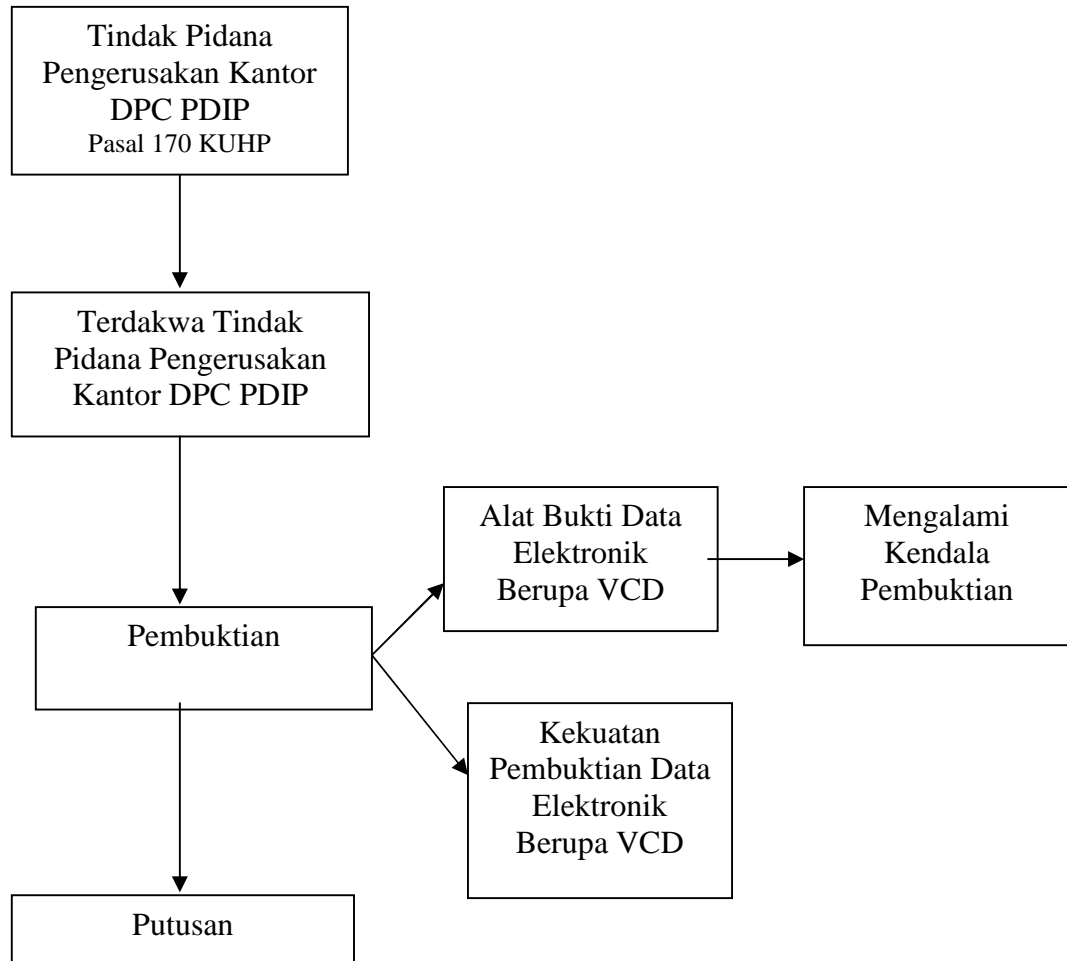
perluasan penafsiran terhadap alat bukti dengan mengakomodir penggunaan informasi atau data elektronik sebagai alat bukti. Selain tindak pidana yang diatur dalam tiga undang-undang di atas, dengan mendasarkan pada Pasal 16 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dapat menggali hukum, maka untuk menemukan hukum dan menerapkan informasi elektronik sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP penegak hukum dapat melakukan terobosan-terobosan melalui metode penafsiran (interpretasi) serta dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Penggunaan metode penafsiran tersebut harus tetap mengedepankan prinsip kemanfaatan, prinsip keadilan dan kepastian hukum (Rusdiana Erma, 2007).

Penggunaan alat bukti berupa alat penyadap dan rekaman video sebenarnya telah diterapkan dalam kasus Bom Bali I, 2002 lalu. Dalam menggunakan alat bukti ini penyidik merujuk pada pasal 27 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Meskipun mengundang kontroversi namun JPU bersikukuh bahwa pembacaan keterangan saksi dari Malaysia dan Singapura yang tidak dapat hadir ke persidangan adalah sah karena sesuai deskripsi alat bukti dalam undang-undang. Selain dalam tindak pidana terorisme, penyidik KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Wewenang ini dicantumkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf a UU no.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian pula yang diatur dalam RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Tentu saja, informasi elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut dapat diuraikan bahwa tindak pidana pengrusakan kantor DPC PDIP merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang. Hal ini sesuai dengan Pasal 170 KUHP. Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini akan diancam dengan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 170 KUHP. Untuk memproses tindak pidana secara hukum diperlukan adanya pembuktian di dalam persidangan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sangat menentukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis dalam suatu perkara, karena hakim akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian ini. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Mendasarkan pada pembuktian maka hakim mempunyai wewenang dalam yang terbatas, dimana hakim dibatasi oleh adanya alat-alat bukti dan barang bukti. Alat bukti yang dibenarkan oleh perundang-undangan menurut Pasal 184 ayat (1) yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Di dalam kasus ini terdapat alat bukti data elektronik berupa *Video Compact Disc (VCD)*. Dalam hal ini hakim lebih hati-hati dan cermat menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian dari alat bukti ini serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian data elektronik berupa *VCD*. Selanjutnya pihak pengadilan melakukan pengkajian terhadap keterangan-keterangan saksi, saksi ahli dan berkas-berkas yang mendukung terhadap kasus tersebut dengan undang-undang yang berlaku maka ditetapkanlah suatu keputusan hakim.

B. Kerangka Pemikiran



Dari bagan tersebut dapat diuraikan bahwa tindak pidana pengrusakan kantor DPC PDIP merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang. Hal ini sesuai dengan Pasal 170 KUHP. Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini akan diancam dengan ancaman pidana yang sesuai dengan Pasal 170 KUHP. Untuk memproses tindak pidana secara hukum diperlukan adanya pembuktian di dalam persidangan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sangat menentukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis dalam suatu perkara, karena hakim akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian ini. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Mendasarkan pada pembuktian maka hakim mempunyai wewenang yang terbatas, dimana hakim dibatasi oleh adanya alat-alat bukti dan barang bukti. Alat bukti yang dibenarkan oleh perundang-undangan menurut Pasal 184 ayat (1) yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Di dalam kasus ini terdapat alat bukti data elektronik berupa *Video Compact Disc (VCD)*. Dalam hal ini hakim lebih hati-hati dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian data elektronik berupa *VCD*. Selanjutnya, pihak pengadilan melakukan pengkajian terhadap keterangan-keterangan saksi, saksi ahli dan berkas-berkas yang mendukung terhadap kasus tersebut dengan undang-undang yang berlaku maka ditetapkanlah suatu keputusan hakim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Data Elektronik *Video Compact Disc (VCD)* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Kantor DPC PDIP Sragen.

Pengakuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek Pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti memang masih sesuatu yang baru dan belum biasa dipergunakan. Padahal di beberapa negara data elektronik sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara, baik itu perkara perdata atau pidana. Sebenarnya Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jauh lebih maju karena sudah mengadopsi alat bukti dokumen elektronik.

Untuk memperkuat uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan, maka penulis mengambil satu contoh kasus yang telah ada untuk dianalisis guna memperkuat penulisan hukum atau skripsi. Contoh kasus yang diambil adalah kasus pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen, dalam penyelesaian kasus ini hakim di Pengadilan Negeri Sragen menggunakan alat bukti berupa *Video Compact Disc (VCD)*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sragen yaitu Bapak Agustinus Setya W, S.H.. dan mempelajari berkas perkara yaitu putusan hakim dengan perkara nomor 05 / Pid.B / 2007 / PN. SRG mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang di Pengadilan Negeri Sragen yang sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Data yang diperoleh dari berkas perkara tersebut sebagai hasil penelitian disajikan serta dianalisis meliputi:

1. Kasus Posisi

Bahwa mereka Terdakwa I. Toni Suwondo, Terdakwa II. Novi Daru Satriawan, Terdakwa III. Tri Wahyono, Terdakwa IV. Supriyanto dan Terdakwa V. Samto merupakan anggota satgas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Sragen, pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2006 sekitar pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2006 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di. Jl. Ronggowarsito No. 17 Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Pada awalnya para terdakwa bersama dengan anggota satgas PDIP yang lainnya berkumpul melakukan unjuk rasa untuk memprotes kepemimpinan DPC PDIP Kab. Sragen hasil Konferensi Anak Cabang (Konfercab) bulan Mei 2006. Unjuk rasa dilakukan untuk memprotes diselenggarakannya Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di Wilayah Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Sragen. Kemudian para anggota Satgas menjadi emosi karena tidak ada Pengurus DPC PDIP Kab. Sragen yang menerima unjuk rasa tersebut.

Selanjutnya anggota Satgas beramai-ramai mendorong mobil jeep Toyota Kanvas No. AD-7411-BD yang terparkir di teras kantor ke halaman kantor DPC PDIP. Setelah mobil berada di halaman, salah satu anggota Satgas menyiram mobil tersebut dengan bensin yang sudah dipersiapkan, kemudian mobil tersebut dibakar. selanjutnya

Dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa oleh jaksa atas tindakannya tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan Pertama (Primair) : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Dakwaan Kedua (Subsida): Perbuatan para terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 406 ayat (1)
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

2. Proses Pembuktian

Proses pembuktian di persidangan mengenai kasus Pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen dilakukan dengan mengajukan barang bukti dan dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dari *video compact disc (vcd)* yang merupakan rekaman terjadinya kejadian atau peristiwa Pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen. Alat bukti keterangan saksi dilakukan dengan menghadirkan 10 orang saksi-saksi atas dasar sumpah / janji menurut agama masing-masing. Alat bukti surat dalam kasus ini berisi penunjukkan bahwa akan dilakukan demo atas ketidaksetujuan terpilihnya pimpinan DPC PDIP yang baru. Selanjutnya Alat bukti keterangan terdakwa dilakukan terdakwa dengan memberikan keterangannya.

Terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Sragen dalam Putusan No. 05/Pid B/2007PN.SRG. tanggal 29 Januari 2007 memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pasal 170 ayat 1 KUHP unsur-unsurnya adalah;

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan;
4. Terhadap barang atau orang;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai pembawa hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan suatu tindak pidana.

Bahwa sesuai dengan pengakuan para terdakwa bahwa mereka bernama sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan dan pengakuan terdakwa tersebut didukung keterangan saksi-saksi serta para terdakwa adalah orang yang sehat akal sehingga menurut hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa sesuai dengan uraian diatas maka menurut hukum unsur ibni telah terbukti.

Ad. 2 Unsur Dimuka Umum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tempat perbuatan di lakukan oleh para terdakwa ditempat yang bisa dilihat oleh masyarakat banyak atau dijalan yang bisa dilalui orang lain.

Sesuai dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi 1 s/d 10 dan diakui oleh para terdakwa bahwa tempat kejadian perkara adalah di Kantor DPC PDIP Sragen yang berlokasi di Jalan Ronggowarsito Np. 17 Sragen dan tepatnya tersebut adalah merupakan jalam umum yang sering dilalui masyarakat umum sehingga orang lain yang lewat pada waktu kejadian dapat melihat secara bebas apa yang dilakukan para terdakwa ditempat tersebut.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka menurut hukum unsur ini telah terbukti adanya.

Ad. 3 Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan

Bahwa yang dimaksud unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan menurut R.SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal 98 adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmanai yang tidak kecil secara tidak sah dan perbuatan itu dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Suharjo, Pambudi, Sarjono, Hadi Sumarto, Paiman, Triyono menerangkan bahwa terdakwa I s/d V ikut bersama orang lain mendorong mobil Toyota Kanvas dari teras kantor ke halaman dan selanjutnya saksi-saksi menambahkan bahwa setelah mobil berada di halaman terdakwa-terdakwa yang lain (berkas terpisah) merobohkan papan nama.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah diakui para terdakwa dan terdakwa-terdakwa sendiri menambahkan ikut bersama Satgas lain mendobrak pintu dan menendang kaca jendela, pintu dengan kaki berdalaskan sepatu hingga rusak.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan tersebut secara serentak bersama-sama yakni sebagian terdakwa mendorong mobil Toyota Kanvas dari teras kantor ke halaman. Sementara sebagian terdakwa merobohkan papan nama dan sebagian terdakwa yang lain menendang-nendang kaca, pintu dan jendela, dengan emosi.

Bahwa sesuai dengan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur tersebut diatas telah terbukti menurut hukum.

Ad. 4 Unsur terhadap barang atau orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur terhadap barang atau orang adalah berarti bahwa pengrusakan itu ditujukan terhadap barang atau orang.

Bahwa kata barang atau orang dalam unsur tersebut adalah tempat alternatif yang berarti jalan salah satu kantor unsur tersebut telah terbukti jika yang lain tidak perlu dibuktikan.

Sesuai dengan keterangan saksi-saksi 1 s/d 10 dan diakui oleh para terdakwa I s/d V bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2006 para terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kantor DPC PDIP Sragen dengan cara memecahkan kaca pintu dan jendela, membakar kursi, merobohkan papan nama serta mendorong mobil dari teras kantor ke halaman dan kemudian terdakwa II menyiram minyak dan selanjutnya dibakar oleh S.Tino.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kantor DPC PDIP Sragen yakni kaca jendela dan pintu pecah serta mobil Toyota Kanvas No.Pol. AD 7411 BD terbakar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur inipun telah terbukti menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dihubungkan satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling mendukung maka majelis berkenan maka bahwa terdakwa I s/d V telah terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang” sebagaimana telah didakwakan jaksa Penuntut umum.

Bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka menurut hukum para terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa sesuai dengan pengamatan majelis selama dalam persidangan bahwa para terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan

perbuatannya serta tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana tersebut.

Bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terdakwa-terdakwa berada tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa tentang barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan adalah milik DPC PDIP Sragen terkecuali kaset VCD maka barang bukti tersebut akan dikembalikan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan karena dipidana maka kepada para terdakwa akan dibebankan untuk membayar ongkos perkara.

3. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pengadilan Dalam Pengambilan Keputusan

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Hal-hal yang meringankan

- para terdakwa sopan selama dalam persidangan.
- para terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar proses persidangan.
- para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- para terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.
- para terdakwa melakukan pengerusakan tersebut karena merasa kesal kepada pimpinan yang baru terpilih yang tidak berdasarkan ARD/ART dan pimpinan tidak pernah merespon usul Satgas (terdakwa-terdakwa).

- para terdakwa dan pengurus DPC PDIP Sragen tidak sepakat menyelesaikan persoalan timbul secara internal.

Setelah melakukan pembuktian di persidangan, akhirnya Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Toni Suwondo, terdakwa II. Novi Daru Satriawan, terdakwa III. Tri Wahyono, terdakwa IV. Supriyanto dan terdakwa V. Samto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Toni suwondo, terdakwa II novi daru satriawan, terdakwa III Tri wahyono, terdakwa IV supriyanto dan terdakwa V samto masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Jeep Toyota canvas AD 7411 BD, satu buah papan nama bertuliskan DPC PDIP. Pecahan kaca , 6 buah batu tegel lantai dan batu bara merah, sebuah potongan daun pintu, sebuah sisi kayu meja yang terbakar, sebatang kayu, sebuah pecahan saklar kipas angin, sebuah potongan kayu pintu, 1 buah kursi, sebuah papan nama bertuliskan sekretariat Ranting, sebuah bok lampu neon, satu buah bingkai pigura dikembalikan kepada DPC PDIP Cabang sragen, sedangkan 1 (satu) keeping vcd rekaman kerusakan PDIP dikembalikan ke Polres Sragen.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pembahasan

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (obyek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang (Adami Chazawi, 2006:101) Sebagaimana diketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang. Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian.

Dalam kasus pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen, alat bukti yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Surat;
- 3) Petunjuk;
- 4) Keterangan Terdakwa.

Alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 KUHAP. Lalu dimanakah letak *video compact disc* sebagai alat bukti? Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sragen yaitu Bapak Agustinus Setya W, S.H. pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 diketahui bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 (tiga) macam alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa. Dalam hal ini alat bukti berupa *video compact disc (vcd)* merupakan alat bukti petunjuk, karena dalam kasus ini petunjuk merupakan gambar rekaman dari suatu kejadian atau peristiwa. *video compact disc (vcd)* penting bagi hakim untuk mengetahui siapa pelaku kejahatan dari tindak pidana pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen. Seperti yang tercantum dalam Pasal 26 A UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti

petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 alat bukti lain dari Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yakni:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, photo, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Mengingat bahwa informasi atau dokumen yang dimaksud Pasal 26 A menyebutkan “ informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar.” maka dapat disimpulkan bahwa *video compact disc (vcd)* merupakan bagian dari informasi dan dokumen yang berbentuk data elektronik.

Secara formal tentu tidak dapat diragukan lagi bahwa informasi atau dokumen yang dimaksud Pasal 26 A dan juga *video compact disc (vcd)* adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 (tiga) alat bukti yang diajukan dalam kasus pengrusakan Kantor DPC PDIP Sragen yaitu: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dalam Pasal 26 A huruf a disebut secara tegas “alat bukti lain”. Artinya kedudukan informasi dan dokumen adalah sebagai alat bukti yang sah sama dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Tentu saja, berdasarkan Pasal 183 alat bukti petunjuk tidak boleh berdiri sendiri, artinya hanya satu-satunya alat bukti, karena fungsi dokumen dan informasi sebagai alat bukti hanya bernilai sebagai bahan untuk membentuk alat

bukti petunjuk saja, tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain membentuk alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, apabila telah diperoleh alat bukti petunjuk informasi dan dokumen dalam hal ini "*video compact disc*", tetap masih diperlukan satu alat bukti lain lagi yang isinya sama atau bersesuaian yaitu keterangan dari saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Pasal 188 KUHAP merumuskan tentang alat bukti petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. *Video Compact Disc* didapatkan dari pihak kepolisian karena dalam setiap kejadian memang ada polisi yang ditunjuk dan mengawasi, dalam hal ini adanya demo atau unjuk rasa yang dilakukan oleh satgas PDIP. Jika terjadi ketidaksesuaian atas keterangan saksi atau keterangan terdakwa pada saat persidangan maka hakim bisa melihat adanya dokumenter dari kejadian atau peristiwa yang sesungguhnya. Jika hakim mengajukan pertanyaan "apakah benar saudara terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada di TKP?" dengan adanya *vcd* terdakwa tidak bisa mengelak bahwa bukan dirinya yang melakukan pengrusakan. Maka, dengan adanya alat bukti *vcd* ini sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Pemberian nilai atas petunjuk itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Selama ini menurut KUHAP, *video compact disc (vcd)* tidak disebutkan secara "*limitatif*". Hakim tidak dapat berpandangan bahwa jika belum ada ketentuan yang mengatur maka suatu kasus tidak dapat diselesaikan, tetapi hakim bisa menginterpretasikan apa yang diyakini hakim karena hakim bisa menemukan kembali hukumnya. Keyakinan hakim sebenarnya tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan, karena keyakinan hakim adalah menyangkut jiwa seseorang tentang isi hati yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri tanpa dapat dipengaruhi oleh orang lain. Jadi keyakinan hakim tersebut diserahkan sepenuhnya kepada seorang hakim yang bersangkutan tanpa dapat dipaksa oleh pihak lain.

Namun demikian keyakinan hakim atas *video compact disc (vcd)* timbul berdasarkan keterangan dari beberapa alat bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Keyakinan hakim tersebut erat kaitannya dengan alat bukti, karena di antara keduanya harus saling mendukung untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan putusan. Jadi untuk menjatuhkan putusan dalam kasus pengrusakan Kantor DPC PDIP Sragen diperlukan syarat adanya alat bukti dan keyakinan hakim. Dari kedua syarat tersebut jelas tidak dapat dipisahkan agar dapat memenuhi syarat pembuktian dalam proses pengadilan. Memperhatikan pendapat diatas bahwa hakim dapat mempergunakan pengetahuannya sepanjang pengetahuannya tersebut didapat dan dikemukakan di sidang pengadilan. Usaha untuk memberikan keyakinan hakim dalam rangka mencari dan menemukan alat bukti harus benar-benar alat bukti yang mempunyai persesuaian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah.

Putusan pidana merupakan putusan pengadilan yang berisi tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum sesuai dengan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan.

Penilaian hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan terdakwa yang dilakukan. Putusan hakim dalam kasus ini tidak hanya didasarkan segi materiil kejahatan semata, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang kehidupan terdakwa, latar belakang perbuatan yang dilakukan, dan dari segi kerugian korban (barang sudah kembali atau tidak).

Putusan atas kasus pengrusakan Kantor DPC PDIP Sragen tersebut didasarkan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP, hakim menjatuhkan putusan karena hakim telah yakin bahwa terdakwalah yang bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini didukung dengan keterangan para terdakwa yang mengakui kesalahannya dan juga dengan alat bukti yang cukup menurut batas minimum pembuktian yaitu adanya keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan *video compact disc (vcd)* yang merupakan bukti petunjuk.

B. Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Memanfaatkan Data Elektronik Berupa Video Compact Disc Dalam Pembuktian.

Pemanfaatan data elektronik merupakan hal baru di dalam dunia peradilan di Indonesia, karena pengakuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Pada umumnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan adanya keyakinan hakim. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didukung oleh alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam kasus pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen hakim menggunakan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Selain itu digunakan juga *video compact disc (vcd)* sebagai alat bukti petunjuk. Pembuktian dalam kasus pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen bukanlah perkara mudah, karena ada kendala-kendala yang menghambat jalannya proses pembuktian di persidangan. Menurut Bapak Agustinus Setya W, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Sragen mengatakan bahwa hambatan yang muncul dalam pembuktian terhadap kasus pengerusakan kantor DPC PDIP Sragen adalah bahwa banyaknya terdakwa yang terlibat dalam kasus ini dan juga adanya unsur turut serta di dalamnya. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi, dimana menurut Majelis Hakim syarat dari perbuatan “turut serta” adalah adanya kerjasama yang erat antara satu pelaku dengan pelaku lain dalam mewujudkan kehendak tersebut, dan mereka melakukan seluruh unsur dari tindak pidana dimaksud. Hal tersebut menuntut hakim untuk memeriksa perkara yang dilakukan secara terpisah yaitu sendiri-

sendiri. kedudukan para saksi dan juga para terdakwa adalah dimana sebagian para saksi juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama namun pada persidangan yang terpisah, maka bisa dimungkinkan adanya penyangkalan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh para saksi dan para terdakwa di depan persidangan yang merupakan suatu bentuk taktik mereka untuk saling memberikan keterangan yang menguntungkan.

Saksi dalam perkara ini juga memberikan pengaruh besar dalam persidangan apabila keterangan yang diberikan saksi – saksi tidak bersesuaian maka tentu saja hal ini menghambat proses di persidangan. Keterangan saksi yang tidak bersesuaian dapat terjadi dikarenakan di persidangan dihadirkan saksi dari terdakwa yang tentu saja akan menguntungkan terdakwa sebaliknya saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau dari pihak korban akan memberatkan terdakwa. Apabila keterangan yang diberikan saksi – saksi tidak bersesuaian dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tidak bersesuaian maka hal ini juga akan memberikan kesulitan bagi hakim dalam memutus perkara. Dari penjelasan tersebut maka alat bukti *video compact disc (vcd)* dalam kasus ini merupakan alat bukti penting dalam pemeriksaan saksi dan para terdakwa. Keterangan yang diperoleh dari saksi dan terdakwa akan disesuaikan lagi melalui alat bukti *video compact disc (vcd)* dan kemudian hakim yang memeriksa perkara ini akan mempertimbangkan apakah keterangan dari saksi dan para terdakwa sudah sesuai dengan kenyataan yang ada di tempat kejadian perkara. Masalah utama dalam memanfaatkan data elektronik berupa *video compact disc (vcd)* adalah belum diatur secara lengkap tentang ketentuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, tetapi hakim yakin dalam hal ini bahwa *video compact disc (vcd)* merupakan alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjuk dalam hal ini didasarkan dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Selama ini hakim sebagai *rechtsvinding* akan berusaha dengan berbagai cara yang dapat diterima oleh hukum dan undang-undang untuk mengisi kevakuman hukum, melengkapi ketentuan undang-undang yang tidak jelas

atau belum diatur guna menggali kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini hakim berupaya bahwa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan seperti halnya *video compact disc (vcd)* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di muka persidangan. Keaslian alat bukti *video compact disc (vcd)* yang diajukan ke persidangan tersebut asli atau tidak juga menjadikan suatu kendala karena tidak adanya pakar Telematika yang berperan sebagai saksi ahli di persidangan. Menurut pendapat penulis pengambilan keputusan oleh hakim dalam kasus ini sudah benar karena berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan juga dengan mempertimbangkan alat bukti *video compact disc (vcd)* sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini adalah sudahlah tepat, mengingat segala alat bukti dalam kasus ini telah jelas menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, baik berdasarkan teori maupun berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian *video compact disc (vcd)* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengrusakan kantor DPC PDIP Sragen adalah bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci atau “*limitatif*” alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Dalam kasus pengrusakan kantor DPC PDIP Sragen, alat bukti yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah: Keterangan saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa. Dalam hal ini alat bukti berupa *video compact disc (vcd)* merupakan alat bukti petunjuk. Pasal 188 KUHAP memberi pengertian tentang alat bukti yang disebut petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya. Petunjuk disimpulkan hakim dalam kasus ini karena adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. *video compact disc (vcd)* merupakan gambar rekaman dari suatu kejadian atau peristiwa. *video compact disc (vcd)* penting bagi hakim untuk mengetahui siapa pelaku kejahatan dari tindak pidana pengrusakan kantor DPC PDIP Sragen. Pemberian nilai atas petunjuk itu diserahkan kepada kebijakan hakim. Dalam hal ini keyakinan hakim juga erat kaitannya dengan alat bukti, karena diantara keduanya harus saling mendukung

untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan.

2. Kendala yang dihadapi hakim dalam memanfaatkan data elektronik berupa *video compact disc (vcd)* dalam pembuktian adalah bahwa data elektronik berupa *video compact disc (vcd)* adalah belum diatur secara lengkap tentang ketentuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, tetapi hakim yakin dalam hal ini bahwa *video compact disc (vcd)* merupakan alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjuk dalam hal ini didasarkan dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Keaslian alat bukti *video compact disc (vcd)* yang diajukan ke persidangan tersebut asli atau tidak asli juga menjadikan suatu kendala karena tidak adanya pakar Telematika yang berperan sebagai saksi ahli di persidangan. Selama ini hakim sebagai *rechtsvinding* akan berusaha dengan berbagai cara yang dapat diterima oleh hukum dan undang-undang untuk mengisi kevakuman hukum, melengkapi ketentuan undang-undang yang tidak jelas atau belum diatur guna menggali kebenaran dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum dalam menangani proses perkara pidana, maka perlu diberikan bimbingan melalui pendidikan dan latihan tentang teknologi informasi saat ini mengingat kemajuan teknologi yang semakin berkembang.
2. Ketentuan yang mengatur alat bukti elektronik saat ini belum diatur secara lengkap di dalam KUHAP, hal ini disebabkan karena KUHAP sekarang masih berdasarkan sistem hukum zaman Belanda. Maka saat ini segera diperlukan revisi KUHAP di bidang pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

3. Sistem peradilan di Indonesia menggunakan sistem pembuktian secara negatif sehingga selain berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan keyakinan hakim. Masalah keyakinan hakim diserahkan sepenuhnya kepada seorang hakim yang sudah seharusnya hakim tersebut mempunyai sifat objektif, arif dan bijaksana dengan tujuan yang seadil-adilnya.
4. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan keadilan. Keadilan dimaksud tidak hanya berdasarkan keadilan menurut hakim saja, tetapi harus mencerminkan keadilan Tuhan. Tugas hakim selain untuk menegakkan keadilan juga harus mencerminkan keadilan Tuhan yang bersifat keadilan untuk akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1993. *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Burhan Ashsofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- H. Adami Chazawi, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : P.T.Alumni
- H.B. Sutopo, 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian)*. Surakarta : Sebelas Maret University Press
- M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- Moelyatno, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara
- R. Soesilo, 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Bogor : Politeia
- Rusdiana Erma, 2007. Tesis: *Kedudukan Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Surabaya : UNAIR

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sudikno Metokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty

W.J.S Poerwadarminta, 1977. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung : Hasta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<http://www.hukumonline.com>

(diambil: 10 Juli 2006)

<http://library@unair.ac.id>

(diambil 15 Maret 2007, oleh Rusdiana, Erma)